

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

“Demokrasi dan Politik Islam”

WACANA

A. Bakir Ihsan

Ambiguitas Politik Agama dalam Demokrasi

Fahmi Muhammad Ahmadi

**Adaptabilitas Hukum Islam di Indonesia
dalam Berbagai Model**

Joharotul Jamilah

Gerakan Sosial dalam Perspektif Islam

Shobahussurur

**Proses Pemilihan Pemimpin Menurut Ibn
Taimiyyah**

Sya'ban H. Muhammad

Kekuasaan dalam Perspektif Politik Islam

M. Zaki Mubarak

**Evolusi Sistem Pemilihan Umum Indonesia
1955-2009**

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. X, No. 2, 2008

Dewan Redaksi

Komaruddin Hidayat
Kautsar Azhari Noer
Bahtiar Effendy
Amsal Bakhtiar
M. Amin Nurdin

Pemimpin Redaksi

Hamid Nasuhi

Anggota Redaksi

Ida Rosyidah
Rifqi Muhammad Fatkhi

Sekretariat

Uus Kudsiyah

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Editorial

~ Demokrasi dan Politik Islam

Articles

- 139-156 **Ambiguitas Politik Agama dalam Demokrasi**
A. Bakir Ihsan
- 157-172 **Adaptabilitas Hukum Islam di Indonesia dalam Berbagai Model**
Fahmi Muhammad Ahmadi
- 173-196 **Gerakan Sosial dalam Perspektif Islam**
Joharotul Jamilah
- 197-214 **Proses Pemilihan Pemimpin Menurut Ibn Taimiyyah**
Shobahussurur
- 215-230 **Kekuasaan dalam Perspektif Politik Islam**
Sya'ban H. Muhammad
- 231-260 **Evolusi Sistem Pemilihan Umum Indonesia 1955-2009**
M. Zaki Mubarak

DEMOKRASI DAN POLITIK ISLAM

Tulisan-tulisan pada Jurnal **Refleksi** kali ini mengantarkan kita untuk menyambut gegap gempita panggung politik bangsa kita yang akan semarak dengan akan diselenggarakannya dua agenda besar pesta demokrasi nasional, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden masa bakti 2009-2014.

Waktu yang kurang dari satu tahun lagi menjelang realisasi kedua agenda besar tersebut membuat seluruh partai politik bekerja ekstra keras untuk merebut suara rakyat dalam pemilihan nanti. A. Bakir Ihsan dalam tulisannya menyoroti tentang kondisi dilematik yang dihadapi oleh partai politik Islam. Menurutnya, secara struktural, asas Islam tidak kompatibel dengan ideologi negara yang menempatkan agama sebagai nilai sosial, bukan sebagai rujukan formal negara. Sementara secara kultural partai politik Islam tidak menunjukkan kekhasan asasnya dalam mengagregasi dan mengartikulasi aspirasi masyarakat, Bahkan muncul kecenderungan ekstensifikasi peran sebagai upaya untuk meraih dukungan tanpa terjebak pada asas. Kalau demikian, apa makna asas bagi partai politik. Dalam konteks asas Islam, apa yang bisa diharapkan dari eksistensi dan fungsi partai politik Islam dalam konstelasi politik nasional.

Budaya partai politik Islam yang tidak menunjukkan kekhasan asasnya tersebut berbanding terbalik dengan hukum Islam di Indonesia sebagaimana dipaparkan oleh Fahmi Muhammad Ahmadi. Tidak sedikit hukum Islam yang menjadi hukum publik dan membuktikan kuatnya sifat fleksibilitas hukum Islam. Pada saat yang sama hukum Islam mengalami proses dinamisasi yang dibuktikan dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan hal-hal kontemporer dan pelebagaan adat sebagai bentuk hukum yang telah ada diadopsi oleh hukum Islam Indonesia dan menjadi bagian pembangunan hukum nasional.

Senada dengan kedua tulisan sebelumnya, Joharotul Jamilah memotret pola dan klasifikasi gerakan sosial berbasis agama (baca: Islam) di Indonesia yang berperan aktif dalam perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati, yaitu

tumbuh dan berkembangnya gerakan-gerakan sosial Islam dengan beragam tipologi. Mulai dari gerakan Islam modernis, neomodernis, hingga yang fundamentalis atau bahkan radikal.

Tulisan selanjutnya dalam Jurnal **Refleksi** kali ini, lebih spesifik membahas tentang proses pemilihan pemimpin. Shobahussurur mencoba menawarkan konsep Ibn Taimiyyah tentang proses pemilihan kepala negara, kualifikasi yang mesti dimiliki seorang pemimpin, dan bagaimana hubungan pemimpin dengan rakyat. Karena kekuasaan dalam perspektif politik Islam merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab, baik kepada Allah sebagai *mudabbir* alam semesta dan kepada rakyat banyak, demikian papar Sya'ban H. Muhammad. Jika pemahaman ini telah menjadi penghayatan dan pengamalan bangsa dan negara, maka tingkat penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dapat diminimalisir.

Sebagai sajian akhir dalam Jurnal **Refleksi** Nomor 2 Tahun 2008 ini, M. Zaki Mubarak membeberkan perjalanan demokrasi di Indonesia sejak tahun 1955 yang mengalami perubahan yang dinamis. Tulisan ini menunjukkan bahwa evolusi sistem pemilihan umum di Indonesia pada rentang waktu tersebut mengalami sejumlah perubahan pada regulasi, partai peserta pemilu, jarak dan fragmentasi ideologi yang semakin melebar meski lebih moderat, peningkatan kualitas dan derajat demokrasi, dan berperannya lembaga-lembaga di luar parlemen. Satu yang tidak berubah, yaitu secara umum Sistem pemilu masih menetapkan sistem yang sama yaitu sistem proporsional, hanya saja tetap mengalami perubahan dari proporsional tertutup menjadi terbuka.

Selamat membaca, semoga beberapa tulisan dalam Jurnal **Refleksi** kali ini dapat menjadi sedikit bahan referensi pembaca dalam menentukan pilihan kelak pada pemilu legislatif dan pemilu presiden-wakil presiden pada tahun 2009 yang akan datang.

Redaksi

GERAKAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Joharotul Jamilah

Abstract: *This article captures the patterns and classification of religious-based social movements (read: Islam) in Indonesia that actively play a role in changing societal behavior. One interesting aspect to note is the growth and development of various typologies of Islamic social movements. These range from modernist Islamic movements to neo-modernist ones, and even to fundamentalist or radical movements.*

Keywords: Transformation; dimensions of change; Islamic social movements.

Abstrak: Tulisan ini memotret pola dan klasifikasi gerakan sosial berbasis agama (baca: Islam) di Indonesia yang berperan aktif dalam perubahan perilaku masyarakat. Beberapa yang menarik untuk dicermati adalah tumbuh dan berkembangnya gerakan-gerakan sosial Islam dengan beragam tipologi. Mulai dari gerakan Islam modernis, neo-modernis, hingga yang fundamentalis atau bahkan radikal.

Kata Kunci: Transformasi; Dimensi Perubahan; Gerakan Sosial Islam.

Pengertian Gerakan Sosial

Gerakan sosial adalah perubahan manifes yang berasal dari bawah yaitu aktivitas-aktivitas yang dilakukan rakyat dalam beragam derajat “kebersamaan.”¹ Gerakan sosial sebagai perubahan sosial dapat bersifat positif, yaitu memperkenalkan hal-hal baru (pemerintahan, rejim politik, adat/hukum/lembaga baru), atau negatif, yaitu menghentikan/ mencegah/ mengembalikan arah perubahan dari proses yang tidak berhubungan dengan gerakan sosial itu sendiri (kerusakan lingkungan, penurunan tingkat kelahiran, peningkatan kriminalitas), atau dari berbagai aktivitas gerakan sosial lain.²

Kausalitas gerakan sosial dengan perubahan sosial dapat dilihat pada beberapa aspek. *Pertama*, gerakan sosial dapat menjadi penyebab hakiki perubahan sosial, yang bisa terjadi pada lingkungan sosial yang kondusif, dan didukung faktor-faktor lain. *Kedua*, gerakan sosial dapat sebagai efek gejala yang mendampingi terjadinya perubahan sosial seperti perubahan karena urbanisasi, dan modernisasi. dalam hal ini gerakan sosial mempengaruhi jalannya perubahan sosial, memodifikasi arah kecepatannya. *Ketiga*, gerakan sosial sebagai mediator dalam rantai kausal “sosial praxis”. Dalam hal ini gerakan sosial merupakan produk dari perubahan sosial sebelumnya, dan menjadi penghasil transformasi sosial yang berikutnya sehingga menjadi wahana, pembawa, dan *transmitter*. Agar dapat mengubah masyarakat secara lebih efektif, gerakan sosial itu sendiri ikut berubah melalui mobilisasi, dan organisasi.³

Definisi yang memadai dari gerakan sosial harus mencakup komponen-komponen:⁴

- 1) Suatu kolektivitas orang yang bertindak bersama,
- 2) Tujuan bersama dari tindakan kolektif itu adalah perubahan dalam masyarakat,

- 3) Kolektivitas itu relatif baur (*diffuse*) dengan derajat organisasi formal yang rendah,
- 4) Tindakannya memiliki derajat spontanitas yang relatif tinggi, menggunakan bentuk-bentuk non-kelembagaan dan tak konvensional.

Bentuk-bentuk Gerakan Sosial

Gerakan sosial dapat dipilah menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:

1. *Cakupan perubahan yang direncanakan*⁵

Gerakan ini mempunyai tujuan relatif terbatas, yaitu mengubah beberapa aspek dalam masyarakat tanpa mengubah struktur kelembagaan inti misalnya gerakan pro atau anti aborsi yang menuntut perubahan UU aborsi dan gerakan hak-hak binatang. Gerakan ini disebut *gerakan reformasi*.⁶ Sedangkan gerakan yang mempunyai tujuan lebih luas dan mendalam, yaitu mentransformasi masyarakat, seperti gerakan hak-hak sipil di AS, gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan. Pada tingkat ekstrem perubahan seluruh aspek inti struktur sosial (politik ekonomi, budaya) membentuk suatu masyarakat alternatif seperti gerakan-gerakan millenarian (Ratu Adil), fasis dan komunis. Gerakan-gerakan seperti ini disebut gerakan Radikal.

2. *Kualitas perubahan yang direncanakan*

Dalam hal ini penekanan pada inovasi, memperkenalkan kelembagaan baru, hukum/ peraturan baru, bentuk kehidupan baru, serta kepercayaan baru. Gerakan ini ingin membentuk masyarakat ke dalam satu pola yang belum pernah ditemukan sebelumnya dengan orientasi ke masa depan, sehingga gerakan ini disebut *gerakan progresif* seperti gerakan republikan, sosialis, dan pembebasan perempuan (*women's liberation*). Sementara itu sebuah gerakan yang berorientasi ke masa lalu, berupaya mengembalikan kelembagaan, hukum, cara hidup dan kepercayaan yang dulu ada, kemudian dibuang, tererosi oleh zaman. Sedangkan penekanan pada tradisi seperti gerakan religius fundamentalis, gerakan ekologis, gerakan kebangkitan etnis di Eropa Timur dan Eropa Tengah setelah hancurnya komunisme.

3. *Sasaran dari perubahan yang di rencanakan*

Sasaran yang terfokus pada struktur sosial ada 2 bentuk: gerakan sosio-politik, perubahan hierarki politik, ekonomi, kelas stratifikasi dan gerakan

sosiokultural: perubahan kepercayaan, nilai, norma, simbol, pola-pola kehidupan sehari-hari seperti gerakan *hippies* dan *punks*.

Sementara sasaran yang terfokus pada individu ada 2 bentuk juga, gerakan mistis religius yang bertujuan mengonversi atau memberi pengampunan pada anggota dan kebangkitan semangat keagamaan seperti gerakan Islam fundamentalis dan gerakan Evangelis oleh Paus John Paul II, dan gerakan sekuler yang bertujuan kesejahteraan individu, moral dan fisik anggota seperti gerakan kebugaran dan gerakan anti merokok atau anti narkoba.

4. *Vektor/arah perubahan yang direncanakan*

Positif yaitu memperkenalkan perubahan. Sebagian besar perubahan yang direncanakan berarah positif. Sedangkan negatif: mencegah perubahan, respons atas perubahan yang berakibat negatif seperti gerakan anti-modernitas (mempertahankan budaya asli, melawan/anti globalisasi), gerakan ekologis (karena dimunculkan oleh pengrusakan lingkungan, polusi dan pengurusan sumber daya akibat industrialisasi).

5. *Strategi yang mendasari atau logika tindakan*

Logika instrumental bertujuan memperoleh kekuasaan politis dan dengan itu memaksakan perubahan di bidang hukum, kelembagaan, dan organisasi masyarakat. Jika berhasil, gerakan sosial ini berubah menjadi kelompok penekan (*pressure group*) atau partai politik, masuk dalam parlemen dan pemerintahan seperti *Green Party* di Jerman, gerakan Solidaritas di Polandia.

Logika ekspresif adalah yang bertujuan menjamin identitas, mendapat penerimaan atas nilai atau cara hidup mereka, memperoleh otonomi, hak sejajar, emansipasi budaya dan politik. Misalnya gerakan hak-hak sipil, hak-hak etnis, feminis dan *gay*.

6. *Perbedaan tipe gerakan sosial berdasarkan masa*

Gerakan sosial lama mendominasi fase awal sejarah modern, terfokus pada kepentingan ekonomi, anggota-anggotanya direkrut dari kelas sosial yang sama, dan diorganisir secara ketat dan terpusat. Contoh: gerakan buruh dan petani, *trade union*.

Gerakan sosial baru bercirikan pada terfokus pada isu, kepentingan, dan bidang-bidang pertentangan sosial baru, sebagai reaksi atas invasi oleh politik, ekonomi, teknologi dan birokrasi dalam seluruh domain ekstensi manusia. perhatian pada kualitas hidup, identitas kelompok, perluasan ruang gerak kehidupan penciptaan masyarakat madani (*civil society*). Fokus

Gerakan Sosial pada isu kultural (otonomi individu); mewakili kelas-kelas berbeda, bagian terbesarnya adalah masyarakat kelas menengah dan dari strata berpendidikan; organisasi gerakannya terdesentralisir dengan jaringan kerja yang meluas dan longgar, tidak kaku dan hierarkis. Contoh: gerakan-gerakan ekologis, perdamaian, dan feminis.

7. *Keniscayaan munculnya gerakan sosial yang kompleks dan heterogen*

Gerakan sosial tandingan adalah suatu gerakan sosial akan menciptakan kondisi untuk mobilisasi gerakan sosial lain dengan tujuan berlawanan. Aktivitas gerakan sosial berbeda antar masyarakat tergantung derajat aktivitas dalam masyarakat. dalam hal ini Smelser menyebut adanya masyarakat aktif dan masyarakat 'pasif'. Masyarakat aktif membentuk dan membentuk –ulang (*form and reform*) dirinya demi keuntungan anggota masyarakat dan memperbolehkan adanya/mendorong kegiatan-kegiatan Gerakan Sosial.

Model Teori tentang Gerakan Sosial

Pada intinya, ada 2 kelompok teori mengenai gerakan sosial, yaitu model yang berorientasi tindakan (*action-oriented*) dan model yang berorientasi struktur (*structure oriented*).

Model yang pertama menekankan pada mobilisasi pelaku. Gerakan sosial muncul dari bawah, jika volume keluhan/keprihatinan, ketidakpuasan, dan rasa frustrasi masyarakat sudah melebihi ambang tertentu. *Variasi 1* model ini menggambarkan gerakan sosial sebagai letupan spontan dari perilaku kolektif yang kemudian memperoleh kepemimpinan, organisasi, dan ideologi. Jadi, gerakan sosial terjadi serta merta. *Variasi 2* model ini menggambarkan gerakan sosial sebagai tindakan kolektif yang memiliki tujuan dan yang direkrut, di mobilisasi dan di kontrol oleh pemimpin-pemimpin, ideologi-ideologi dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi, gerakan sosial merupakan hasil bentukan.

Sedangkan model kedua menekankan konteks struktural yang memfasilitasi atau menghambat munculnya gerakan sosial. Gerakan sosial berkembang jika kondisi, situasi, dan keadaannya kondusif. *Variasi 1*, model ini menggambarkan potensi adanya gerakan sosial “dibebaskan” dari atas ketika hambatan-hambatan, rambu-rambu dan pengawasan pada tataran sistem politik melemah. Potensi gerakan sosial ini ada secara konstan dalam setiap masyarakat pada level tertentu. *Variasi 2*, model ini menggambarkan gerakan sosial dibangkitkan dengan membuka wahana-

wahana dan kesempatan. kesempatan baru yang memfasilitasi tindakan kolektif. Faktor penentunya adalah karakter sistem politik, khususnya struktur kesempatan politik. Pada tahun 1980-an kedua model ini mulai bersintesis karena disadari bahwa faktor-faktor yang mendorong gerakan sosial yang sedemikian kompleksnya.

Gerakan Sosial dan Perubahan

Gerakan sosial kadang-kala mampu mengubah masyarakat secara dramatis, namun sering-kali pengaruhnya kecil dan selintasan (*transitory*). Lebih jauh, gerakan tumbuh dan berkembang dalam beragam cara ketika berinteraksi dengan masyarakat di mana ia berkembang. Dua hal akan di bahas di sini: (1) bagaimana gerakan ditransformasi ketika berinteraksi dengan masyarakat, dan (2) bentuk dampak gerakan bagi masyarakat.

1. Transformasi gerakan

Pertama, ada hasil akomodasi dan kooptasi sebagaimana di jelaskan teori klasik Weber-Micel. dalam bentuk perkembangan ini gerakan mengubah struktur dan ideologinya menjadi lebih bersesuaian dengan nilai-nilai dan bentuk sosial yang ada dalam lingkungan sosial. Agenda dan program-program gerakan untuk mengadakan perubahan dapat diambil-alih oleh penguasa dan menjadi bagian dari tujuan-tujuan masyarakat luas untuk berubah.⁷

Kedua, gerakan dapat menghilang karena beragam alasan. Ia dapat hilang setelah berhasil, jika penguasa mengupayakan bentuk perubahan sebagaimana yang menjadi tujuan gerakan. Ia dapat hilang setelah kegagalan-kegagalan awal karena tidak memiliki kemampuan untuk memobilisasi dukungan dan sumber daya untuk melanjutkan perjuangan. Ia dapat hilang karena secara efektif dapat ditekan oleh penguasa.⁸

Penting juga untuk dicatat, bahwa karena gerakan terbentuk dari beragam sayap dan faksi, sebagian darinya dapat menghilang untuk sementara bagian-bagian lainnya gagal dan menghilang. Lebih jauh, suatu gerakan dapat menghilang untuk sementara waktu dan tumbuh kembali pada waktu yang lain.

Ketiga, gerakan dapat terus eksis tanpa menjadi terlalu berhasil ataupun gagal total. Dalam hal itu ia dapat menjadi organisasi sektarian, yang di sebut Zald & Asch (1966) sebagai gerakan yang di tuduhkan (*becalmed*). Gerakan demikian itu menciptakan “*ninche*” ekologis yang stabil tetapi

marginal dalam masyarakat. Ia mengalami pergeseran tempat (*displacement*), yaitu mengubah tekanan tujuan Gerakan sosial dari untuk perubahan sosial menjadi menekankan kegiatan yang dapat memelihara gerakan dan organisasinya. Zald & Asch menyebut ini sebagai pergeseran dari “*purposive incentives*” menjadi “*solidarity incentives*”.⁹

Keempat, dan yang paling jarang, gerakan sosial dapat berhasil sedemikian masif sehingga di jadikan kerangka-kerja masyarakat baru. Hal ini merupakan tujuan gerakan revolusioner. Revolusi yang berhasil merupakan kejadian politis dan sejarah yang langka. Revolusi politis lebih mungkin berhasil pada masyarakat yang mengalami transformasi cepat dari pertanian ke industri. Ia lebih mungkin terjadi jika ada perubahan cepat dalam konteks ekonomis, teknis, dan demografis, sebagaimana kasus revolusi politik di Perancis, Rusia, Mesir, Kuba, dan Nikaragua. Revolusi demikian itu, meski merupakan kejadian yang jarang dan dramatis dalam mentransformasi masyarakat, tidak pernah secara penuh berhasil mengubah struktur dan nilai-nilai dari tatanan lama.¹⁰

2. *Gerakan dan Dimensi Perubahan*

Ada 3 bentuk konsekuensi gerakan untuk perubahan, yaitu: mendramatisir isu-isu sosial, menciptakan perubahan normatif, dan menciptakan perubahan struktural.¹¹

Berhasil ataupun tidak untuk mencapai tujuannya, gerakan sosial mampu mendramatisir isu-isu yang memerlukan perhatian publik (semisal ketimpangan antar ras dan antar jenis-kelamin, polusi, aborsi, kesehatan mental, penggunaan berlebih bahan-bahan kimiawi, kekerasan dalam rumah tangga, atau ancaman perang nuklir dan keamanan pembangkit tenaga nuklir). dalam hal ini, ia instrumental dalam menciptakan masalah-masalah sosial yang di prihatinkan publik dengan agenda untuk aksi publik. Artinya, ia menciptakan kontroversi dan perubahan.

Salah satu perubahan yang paling tampak yang diciptakan gerakan sosial adalah perubahan dalam norma dan nilai sosial. dalam perubahan-perubahan budaya populer di Amerika Serikat, terdapat tekanan kuat untuk membatasi bahasa yang *seksis* dan *rasis* dalam situasi publik dan membatasi penggambaran stereotip dalam media masa. Perubahan ini mencerminkan perubahan normatif yang lebih dalam yang di cipta gerakan itu, yaitu kesetaraan dalam hubungan in-terpersonal.

Gerakan sosial dapat memperluas cakupan penerapan nilai-nilai budaya yang ada (misalnya demokrasi, kesetaraan, penghargaan atas lingkungan alam). Ia dapat memperluas penerapan nilai-nilai yang ada ini pada isu-isu baru dan kelompok yang prihatin dan dapat mendorong pembentukan norma-norma dan kebijakan. kebijakan baru yang berhubungan (semisal AMDAL dan kebijakan “*Affirmative Action*”). dalam melakukan hal itu gerakan dapat mempengaruhi arah kebijakan publik mengenai isu-isu sosial.

Di bidang perubahan struktural yang melibatkan akses pada sumber daya, pencapaian gerakan reformasi (di Amerika Serikat) bersifat mendua. Tentu saja gerakan sebagian besar: pertumbuhan kelas menengah kulit-hitam yang cukup besar, tumbuhnya kesempatan bagi perempuan, akses pada pendidikan, pekerjaan, dan layanan medis bagi spektrum populasi yang lebih luas. Hal ini merupakan perubahan nyata, suatu kemajuan menurut pandangan dari aktivis gerakan. Akan tetapi, pemimpin gerakan sering kali menganggap bahwa keberhasilan demikian itu belum lengkap, dan sepele di banding harapan mereka untuk melakukan transformasi masyarakat.¹²

Ringkasan, gerakan paling mungkin berhasil membentuk ulang tatanan budaya dan normatif dengan mengubah bahasa yang kita gunakan dan bagaimana kita berinteraksi satu sama lain. Gerakan sosial dapat membentuk perubahan struktural dalam hal distribusi kekayaan, kekuasaan, hak-hak pribadi, dan kesempatan namun perubahan yang demikian itu lebih sulit karena suatu gerakan sosial dengan sendirinya terjadi konflik dengan kepentingan-kepentingan dan kelompok-kelompok lain untuk sumber daya yang sama.

Gerakan Sosial dalam Perspektif Islam

1. *Prinsip-prinsip Gerakan Sosial Islam*

Secara historis gerakan sosial adalah fenomena universal yang terjadi hampir di semua masyarakat berkembang dan modern. Rakyat melakukan gerakan sosial karena mempunyai alasan untuk bergabung dan berjuang untuk mencapai tujuan kolektif mereka dan menentang orang yang menghalangi mereka mencapai tujuan tersebut. Bahkan menurut sejarawan pada zaman kuno pun terjadi gerakan-gerakan sosial berupa pemberontakan dan protes ketidakpuasan masyarakat, seperti gerakan keagamaan yang kuat di abad pertengahan, pemberontakan petani dan lain-lain. Akan

tetapi gerakan sosial besarlah yang dianggap oleh para pengamat sebagai awal dari masyarakat modern, terutama revolusi Inggris, Perancis dan AS.

Gerakan sosial sebagai sebuah proses perubahan juga terjadi bukan hanya di dunia barat, tetapi di dunia Islam pun dikenal dengan gerakan-gerakan yang mengarah kepada suatu perbaikan dalam masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam mendorong semangat juang, semangat menolak dan semangat meniadakan keadaan yang tidak diinginkan di kalangan umatnya melalui: ‘jihad’ yaitu mengarahkan sesama manusia untuk melakukan apa yang digariskan oleh Islam (*al-amr bil ma’ruf*) dan melarang sesama manusia melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Islam (*a-nahi ‘an al-munkar*), sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an, surat Ali Imron ayat 104, yang artinya,

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Kemudian QS. Āli ‘Imrān: 110 dan 114;

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...” (QS. Āli ‘Imrān: 110)

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan bergegas kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan, mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.” (Āli ‘Imrān ayat 114)

Bila keadaan yang ada tidak disukai dan tidak manusiawi, maka kita tidak boleh menyerah dan menerima. Kita harus berupaya sedapat mungkin menolak dan menentang tatanan ini demi tercapainya keadaan yang diinginkan dan dicita-citakan. Sebagaimana yang dilontarkan oleh Kuntowijaya dalam “Paradigma Islam tentang Transformasi Sosial”, bahwa cita-cita transformasi Islam harus berakar pada misi ideologis yaitu menegakkan *amar ma’ruf* dan *nahi munkar*, yang berarti humanisasi (manusiawi) dan liberasi (pembebasan). Setiap gerakan Islam ke arah transformasi sosial pasti melibatkan unsur humanisasi, emansipasi, liberasi dan transendensi. Pembebasan, menurut Kunto dan Nurcholis adalah melalui modernisasi.¹³

Ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan atau dijadikan pedoman oleh sebuah pergerakan Islam untuk suatu perubahan yaitu; *pertama*, prinsip ketauhidan, prinsip tauhid ini merupakan landasan yang pertama dan

utama dalam sebuah gerakan sosial Islam. Prinsip tauhid adalah perkara yang tiada pernah berubah, bersifat permanen dan tetap demikian selamanya. Islam menghadirkan tauhid dan menghargai fitrah manusia secara sekaligus sebagai kesatuan monolitik yang tak terpisahkan. Dengan demikian sebuah gerakan untuk sebuah perubahan sosial dimaknai dalam Islam sebagai dinamika hidup, buah dari kreasi insaniah atas kesadaran Ilahiyah, artinya iman menjadi landasan dari aktualitas Islam.¹⁴ *Kedua*, prinsip keadilan. Keadilan berlangsung untuk selamanya, agar tidak terjadi kesenjangan dan perbedaan kelas untuk menghilangkan diskriminasi, dan untuk berjuang menegakkan masyarakat tanpa kelas. dalam Islam tidak boleh ada kekejaman dan penganiayaan terhadap seseorang, walaupun orang tersebut penjahat yang harus dihukum mati.¹⁵ *Ketiga*, prinsip kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan bukan anarki, tetapi yang wajar dan rasional. Tiap-tiap orang harus bebas berpikir, berkata dan menulis, dan hanya dengan keadaan itulah gerakan Islam akan berhasil atau melalui ijtihad untuk melakukan perubahan dan pembaharuan sesuai dengan syarat. syarat utama berijtihad tersebut.¹⁶ Tiap-tiap orang diberi kebebasan untuk berpikir, berpendapat, walaupun berbeda. Perbedaan pendapat bisa diselesaikan dengan bermusyawarah, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Āli ‘Imrān 159;

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-ah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.

Dari ayat di atas jelas, bahwa segala urusan *duniawiah*, seperti ekonomi, politik, kemasyarakatan dan lain-lain bisa diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dan setelah itu berserah diri pada Allah SWT. Senada dengan ayat di atas dalam sebuah keutamaan kata bahwa “Perbedaan pendapat di kalangan umat (ulama)-ku adalah suatu rahmat”. Perkataan ini pun sejalan dengan hadis lain dalam suatu riwayat yang menyatakan: “Aku tinggalkan kamu sekalian atas prinsip-prinsip agama (Islam) yang tidak tegang (mudah, luwes, elastis). Bila dalam suatu masyarakat terjadi

suasana bebas berbeda pendapat, mengemukakan pandangan dan pendapat tentang ekonomi, sejarah, masyarakat dan manusia itu sendiri, maka akan timbul latar belakang yang lebih sehat yang akan menjadikan Islam mampu tumbuh dengan baik. Pengakuan akan tradisi ikhtilaf (berbeda pemahaman/ pendapat), dalam tradisi Islam menjadi indikasi atmosfer demokrasi dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan. Hal ini bisa terlihat pada masa Islam awal. Pelbagai karya tafsir dan syarah hadis dengan pendekatan yang berbeda-beda melahirkan pemaknaan-pemaknaan teks dalam cakupan sosial historis yang plural, dinamis, dan inklusif.

2. *Bentuk-bentuk Gerakan Sosial Islam di Indonesia*

Para ahli mengklasifikasikan gerakan-gerakan sosial Islam dalam beberapa kelompok atau kategori yang berbeda satu dengan lainnya. Kadang-kadang pengkategorian tersebut hanya berbeda istilah atau nama yang inti sebenarnya merujuk pada kelompok yang sama. Ada yang mengelompokkan gerakan Islam fundamentalis, gerakan Islam modernis, gerakan Islam tradisional, Gerakan Islam Radikal, Gerakan Islam Militan dan Gerakan Revivalisme Islam, serta istilah-istilah lain yang punya makna hampir sama.

Munculnya gerakan-gerakan sosial keagamaan di Indonesia bukan baru beberapa tahun ini sebagai sebuah fenomena yang terjadi pada masyarakat yang berkembang. Jauh sebelum pemerintahan orde baru atau pada masa Orde lama bahkan pada masa kolonial Belanda sudah banyak terjadi gerakan-gerakan atau protes terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah atau adanya ketidakadilan dalam masyarakat.

Pada abad ke 19 atau tepatnya pada tahun 1888 terjadi pemberontakan oleh kaum petani Banten yang menewaskan seorang kolonial Belanda yang bernama Gubbels. Yang menarik dari pemberontakan yang berpusat di kota Cilegon ini adalah, peranan para kaum agamawan yaitu para Kiai dan haji-haji yang memimpin maupun motivator ideologis gerakan tersebut. Kehadiran para agamawan tersebut bersangkut paut dengan doktrin ajaran Islam yang bercampur baur dengan unsur-unsur lokal, dan sama sekali tidak terkait dengan jaringan birokrasi pemerintahan kolonial, karena mereka ini para pemimpin lokal tradisional.¹⁷ Menurut Tom Pires pemberontakan para kiai, haji dan kaum tani sebagai sisa-sisa terakhir dari kekuatan yang berasal dari daerah pesisir pantai sebagai pengusaha muslim yang kuat di Jawa karena mereka raja kapal dan rakyatnya yang telah terintegrasi ke dalam sektor ekonomi pertanian, disebabkan perubahan-

perubahan besar yang terjadi di dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Islam pesisir yang wilayah-wilayah kerajaannya dikuasai kembali oleh kekuasaan birokrasi agraris Jawa.¹⁸

Bentuk-bentuk reaksi atau protes tersebut tidak hanya ditujukan kepada orang-orang asing saja, melainkan juga kepada kaum birokrat pribumi yang terintegrasikan secara mendalam ke dalam kekuasaan asing. Mereka ini (kaum birokrat pribumi) dicap sebagai orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu, berfoya-foya, melanggar etika dan hukum agama, serta munafik. Bahkan Pangeran Diponegoro pun melakukan reaksi atas tema yang sama karena keraton Yogyakarta dan Surakarta telah lupa untuk melindungi agama Islam. Menurutnyanya banyak muslim Jawa tidak dapat membaca syahadat, tidak salat lima waktu, lupa membayar zakat dan lebih jauh tidak menunaikan ibadah haji. Di samping itu ada orang-orang muslim Jawa yang suka mabuk-mabukan dan bergaul dengan kaum perempuan tanpa menikah.¹⁹ Dengan demikian, gerakan-gerakan masyarakat Islam Jawa pada abad ke. 19 dan awal abad ke-20 hampir sepenuhnya didasari oleh gabungan kedua ideologi yaitu *jihadism* dan *Mahdiism*.²⁰

Banyak gerakan yang melakukan reaksinya melalui organisasi yang lebih formal yang dapat menyuarakan aspirasinya lewat gerakan-gerakan politik. Pada awal abad ke-20 lahir gerakan politik Sarekat Islam (SI), tepatnya pada tahun 1912. Organisasi ini berhasil mengakumulasi anggota sampai 2,5 juta orang, suatu hal sangat fantastis dan modern yang pada saat itu struktur pendudukannya didominasi kaum petani. SI yang beranggotakan kalangan pengusaha atau pedagang sukses mempunyai visi kesadaran kelas. Di samping berusaha mengeliminasi pengaruh kaum feodal dan pemimpin-pemimpin pribumi tradisional, SI juga mengarahkan aksinya menentang dominasi kapitalis Barat.²¹ SI sebagai sebuah gerakan organisasi politik yang berlandaskan ideologi Islam yang mempunyai konsep *ummatan wahidah* mempunyai daya panggil masif terhadap kekuatan massa bagi proses mobilisasi dan pengorbanan.

Kemampuan pengorganisasian diri kaum muslimin secara politik setelah kemerdekaan, bisa diletakkan kepada Masyumi yang lahir 7 November 1945. Sebagai saluran politik tunggal bagi seluruh faksi-faksi dan aneka golongan Islam, Masyumi yang saat itu dipimpin Natsir, sempat menjadi pilar kekuasaan yang disegani. Masyumi dapat dukungan luas dari kalangan kota, kaum pedagang, dan lapisan terdidik Islam. Masyumi pada masa itu satu-satunya partai politik yang didukung oleh berbagai kalangan.

Sekitar 11 organisasi keagamaan, sosial dan pendidikan, di mana Muhammadiyah dan NU merupakan yang terpenting. Karena pengaruh Masyumi yang sangat besar dan meluas membuat kekhawatiran Presiden Soekarno pada saat itu terhadap partai Islam, dan mengancam gagasan Negara Islam pada tahun 1952 di Amuntai, sebagai upaya mengerem laju perkembangan pengaruh partai politik ini, dan pada tahun 1960 Masyumi dibubarkan. Muhammadiyah melalui gerakan sosial keagamaan mempunyai peran yang jauh lebih besar pengaruhnya di wilayah perkotaan sebagai penyebar gagasan negara modern Indonesia di kalangan kaum terdidik, melalui pembiasaan membuat laporan-laporan dan publikasi organisasi dalam bahasa Indonesia pada masa kolonial. Sedangkan NU yang mempunyai akar pengaruh di kalangan masa pedesaan, melalui pihak kiai, yang menerjemahkan gagasan-gagasan abstrak tentang politik modern kepada kalangan “tak terdidik” di awal kemerdekaan.²²

Menurut La Ode Ida, NU dikatakan sebagai organisasi massa Islam tradisional, dengan ciri-ciri: menganut dan mengembangkan empat mazhab (Imam Syafi’i, Hambali, Maliki dan Hanafi), metode pendidikan Islam diterapkan melalui pesantren-pesantren yang dinilai kurang mampu mengakomodir perkembangan dunia modern, dan pola hubungan struktural internal komunitas NU bersifat subordinatif, yang menonjolkan peran Kiai pada lapisan teratas dengan berbagai legitimasinya.²³ Namun setelah kembali ke *khittah* 1926, organisasi ini banyak melakukan pembaharuan terhadap visi, orientasi, maupun strategi. yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. NU sebelum kembali ke *Khittah* 1926 merupakan organisasi politik praktis. Selain bergerak di bidang pendidikan pondok pesantren, NU juga menjadi kekuatan-kekuatan sosial dan kekuatan politik dengan gerakan-gerakan yang berbeda dari sebelumnya yang lebih bersifat transformatif yaitu di satu sisi hendak mencairkan kebakuan kultur, visi, dan orientasi intern NU, di sisi lain berupaya membangun kesadaran warga *nahdliyin* untuk bebas dari intervensi negara.

Hingga tahun 2000-an ini, perjalanan NU mengalami tiga fase perkembangan dengan ciri yang berbeda.²⁴ *Pertama*, fase sebelum kemerdekaan. Ciri pada fase ini ditekankan pada pengembangan ajaran *ahl al-sunnah wal al-jamaah* melalui pendidikan pesantren. Para Kiai pada saat itu lebih berperan terhadap pengembangan pergerakan keagamaan dengan mendoktrin masyarakat pedesaan melalui ajaran empat mazhab, dan kiai

menjadi figur pemimpin yang disegani. Fase *kedua*, NU ikut terlibat dalam politik praktis. Hal ini tampaknya berkaitan dengan situasi politik pada saat itu, atau sebagai dampak dari diakomodasinya kekuatan-kekuatan politik yang tumbuh dalam masyarakat untuk mewujudkan diri menjadi partai politik, di mana NU bergabung dengan Masyumi, yang kemudian memisahkan diri pada tahun 1952 menjadi partai NU. Ketika NU menjadi parpol tersendiri, gaungnya memang terasa dan terbukti ketika pemilu 1955, ia menjadi tiga besar setelah PNI dan Masyumi, dan pada pemilu 1971 menempati posisi kedua setelah Golkar. Hingga pemilu 1977 kebesaran NU masih dirasakan, dan menjadi kebanggaan tersendiri di kalangan warga NU. Sedangkan fase *ketiga*, sebagai fase terakhir, adalah fase kembali ke *khittah* 1926, yang menginginkan NU kembali pada semangat awalnya. Alasan mendasarnya, sejak NU berpolitik praktis ada kecenderungan yang menunjukkan gejala terlantarnya lembaga-lembaga pesantren sebagai basis pengembangan gerakan NU.

Gerakan ini, pada taraf awal, sebenarnya merupakan gerakan pemikiran di kalangan cendekiawan NU di bawah kuat tokoh-tokoh NU generasi ketiga yang telah memperoleh pendidikan yang relatif lebih sekuler. Perjalanan NU era kembali ke *Khittah* 1926 boleh dikatakan sarat dengan ketegangan dan konflik. Bagi kalangan politisi NU, kembali ke *khittah* menjadikan mereka semakin mengalami keretakan.

Orientasi gerakan pembaharuan yang dilakukan kalangan cendekia generasi ketiga NU di bawah pengaruh kuat Gus Dur, dan gerakan anak-anak muda NU sebagai pendukungnya, pada dasarnya diarahkan pada dua sasaran sekaligus, yakni pada lingkup internal maupun eksternal NU, khususnya yang pola hubungan rakyat dan kekuasaan. Pada sasaran pertama, para aktivis ini tidak hanya bertumpu pada kegiatan pendidikan pesantren saja tapi sudah diperkenalkan dengan konsep demokrasi, hubungan negara-rakyat, perkembangan masyarakat kapitalis yang mendominasi dunia ketiga, termasuk hegemoni negara. Sedangkan pada sasaran eksternal mengembangkan hubungan rakyat-negara yang lebih egaliter dengan konsep gerakan *civil society*, dengan prinsip egalitarianisme dan inklusivisme yang bersifat universal, yang menekankan pada independensi masyarakat yang berhadapan dengan kekuasaan negara, di mana independensi ini dianggap sebagai akar dari gagasan dan gerakan demokratisasi.²⁵

Organisasi keagamaan terbesar kedua setelah NU adalah Muhammadiyah yang dianggap sebagai gerakan pembaharu Islam di Indonesia, yang

mempunyai tujuan untuk menciptakan masyarakat yang *mardhatillah*, yang implementasinya adalah memasyarakatkan prinsip *amar makruf nahi munkar*. Ormas ini didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta pada tahun 1912.

Menurut Kuntowijoyo, ada tiga lingkungan sosio-kultural yang dihadapi Muhammadiyah pada waktu didirikan, yaitu tradisionalisme Islam, Jawaisme, dan modernisme kolonial. Sebagai gerakan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan semboyan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, gerakan ini pada mulanya semata-mata bersifat agama, tetapi ternyata semboyan itu juga membawa konsekuensi logis yang bersifat duniawi.

Empat peran Muhammadiyah yang diungkapkan oleh Alwi Shihab adalah pembaruan agama, perubahan sosial, kekuatan politik dan membendung Kristenisasi. Pembaruan agama Muhammadiyah –*tajdid*, puritanisme, Islam yang otentik tertuju pada tradisionalisme Islam dan Jawa[isme], maka tiga peran yang lain (perubahan sosial, kekuatan politik dan pembendung Kristenisasi) ditujukan pada modernisme kolonial. Untuk peran kedua Muhammadiyah membuat dan membuka sekolah-sekolah yang berbuah perubahan sosial dan untuk peran kedua menjadi tempat persemaian nasionalisme. Sedangkan peran terakhir yaitu Muhammadiyah harus mempunyai banyak amal dan usaha yang dapat membendung Kristenisasi.

Secara populer Muhammadiyah merumuskan keinginannya untuk memberantas TBC (*taqlid, bid'ah, churafat*)²⁶ dari umat. Pemberantasan khurafat (tahayul) ditujukan kepada tradisionalisme Islam maupun Jawaisme yang pada saat itu banyak kepercayaan masyarakat mendekati syirik (mendudukan Allah) secara terang-terangan. Misalnya minta restu kepada makam-makam keramat, memelihara jin, mempunyai jimat, dan lain-lain yang tidak sesuai dengan kemurnian Islam. Sementara itu Islam menekankan pada ikhtiar yang rasional, maka yang terjadi rasionalisasi.²⁷ Di samping itu Muhammadiyah dalam gerakannya menentang mistikasi agama yang dilakukan para sufi atau dengan istilah demistifikasi. Meskipun Muhammadiyah keberatan dengan cara beragama sufisme tapi tidak keberatan dengan doa dan zikir yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah.

3. *Gerakan Pemikiran Neo-Modernisme Islam di Indonesia*

Dalam pembahasan gerakan pembaharuan pemikiran Islam ini akan dibahas di sini tiga bentuk pemikiran²⁸ yaitu “Islam Rasional”, “Islam

Peradaban”, dan “Islam Transformatif”. Islam Rasional lebih diwakili oleh Harun Nasution dan Johan Effendi, Islam Peradaban dilontarkan oleh Nurkholis Madjid dan Kuntowijoyo, sedangkan Islam Transformatif diuarakan oleh Dawam Rahardjo dan Adi Sasono. Pengelompokan ketiga pemikiran ini oleh Rahman didasarkan pada tiga kepentingan yaitu:

Pertama, kepentingan “teknis” dari Islam rasional. Penelitian keislaman mereka dilakukan dalam memenuhi fungsi menetapkan pendapat, menghilangkan kesangsi, dan akhirnya memperoleh kepercayaan tentang Islam yang kokoh. dalam Islam Rasional yang dicari adalah ilmu keislaman yang rasional, untuk mendapatkan iman yang rasional dan amal yang rasional untuk mendapatkan suatu orientasi kerja keislaman.

Kedua, kepentingan dari Islam peradaban, adalah “praktis” untuk mendapatkan “makna” dari perwujudan konkret al-Qur’an. Di samping analisis hermeneutis dari konsep-konsep kunci al-Qur’an, mereka juga memberi perhatian besar pada Islam kaum Salaf dengan metode *verstehen* (empat) – meminjam istilah Weber yaitu mencoba memahami bagaimana kalangan salaf menghayati dan menjalankan Islam serta ingin menemukan makna dari proses pembentukan Islam sebagai sebuah dorongan sejarah yang menghasilkan sebuah peradaban Islam. Itulah sebabnya kalangan Islam Peradaban, sangat memperhatikan sejarah sosial untuk mendapatkan “makna” tadi dan mencoba mentransformasikan pengertian dari sejarah sosial dewasa ini.

Ketiga, kepentingan dari kalangan Islam transformis adalah “emansipatoris”, arus utama yang selalu menjadi dasar dalam menafsirkan al-Qur’an mereka adalah visi al-Qur’an tentang transformasi. dalam tafsiran Islam transformatif, kemodernan sebenarnya identik dengan Barat dan Westernisasi dan juga kapitalisme yang telah mendominasi dan membuat Dunia Islam dan Dunia Ketiga menjadi miskin dan terbelakang. Dan agenda dari Islam Transformatif inilah membebaskan masyarakat muslim dari dominasi struktur masyarakat kapitalis.

Sejak tahun 1970-an Harun Nasution dianggap sebagai pembaharu dalam bidang teologis atau ilmu Kalam yang pertama di Ciputat Islam Rasional Harun mempunyai relevansi dalam dua hal:²⁹ yaitu aspek etos rasionalitas dalam pemikiran Islam yang mempunyai dampak pembebasan manusia dari hal-hal yang bersifat mitos dan memberi pengakuan kapasitas manusia yang mempunyai kebebasan (*Free will, free act*). *Kedua*, pengembangan secara lebih jauh ke arah kebebasan manusia dan kaitannya

dengan perkembangan kepribadian manusia dan implikasinya pada tanggung jawab sosial manusia di muka bumi ini.³⁰

Pada tahun 1968, Nurcholis Madjid merumuskan modernisasi sebagai rasionalisasi. Dan itu berarti proses perombakan pola pikir dan yang berlaku tata kerja baru yang tidak rasional dan digantikan dengan tata kerja dan pola pikir yang rasional. jadi yang disebut modern, kalau ia bersifat rasional, ilmiah dan bersesuaian dengan hukum-hukum yang berlaku dalam alam.³¹

Menurut Nurcholis modernisasi merupakan perintah Tuhan dan merupakan kewajiban yang mutlak, karena kemodernan identik dengan keislaman. Modernitas mengandung arti lebih dalam lagi yaitu pendekatan kepada kebenaran Mutlak yaitu Allah. Jadi modernitas adalah suatu proses penemuan kebenaran-kebenaran yang relatif menuju kebenaran yang Mutlak, yaitu Allah.

Dari semua pemikiran modernitas Islam Nurcholis, titik tolaknya sangat jelas yaitu konsep tauhid yang menurutnya mempunyai efek pembebasan. pembebasan pertama dari Tauhid adalah dari unsur-unsur mitologis, yaitu tidak mensyirikkan Allah Pembebasan kedua pembebasan yang sudah diperoleh harus diisi dengan kepercayaan yang benar yaitu Tuhan itu sendiri. Implikasi dari pembebasan ini adalah seseorang akan menjadi manusia yang terbuka, kritis dan tanggap terhadap masalah-masalah kebenaran dan kepalsuan yang ada dalam masyarakat. Efek pembebasan tauhid di atas akan mengalir dari yang bersifat individual kepada yang lebih sosial. dalam Al-Qur'an prinsip tauhid berkaitan dengan sikap menolak *thaghut* (apa-apa yang melewati batas), sehingga konsekuensi logisnya pembebasan sosial yang bersifat egalitarian.³²

Sedangkan menurut Kuntowijoyo, untuk mencapai cita-cita transformasi masyarakat muslim perlu rintisan "ilmu sosial transformatif" atau "ilmu sosial profetik". Menurut Konstruksi Pengetahuan itu harus dibangun oleh al-Qur'an dengan tujuan agar kita memiliki hikmah yang membentuk perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai normatif al-Qur'an, baik pada level moral, maupun sosial.³³ Oleh karena itu menurutnya suatu gerakan sosial harus dimotivasikan dan didasarkan pada teori sosial Islam yang sedang dibangun.

Islam Transformatif Adi Sasono dan Dawam Raharjo adalah sebuah kritikan terhadap Islam Rasional dan Islam Peradaban dan memberikan alternatif untuk menganalisis penyebab atas keterbelakangan dan

kemunduran umat Islam Indonesia. Islam Rasional melihat keterbelakangan disebabkan oleh sikap *fatalistic*, *predeterminisme*, penyerahan diri pada nasib, sedangkan Islam Peradaban lebih disebabkan karena etos kerja dan etos sosial yang rendah. Sedangkan Islam Transformatif melihat keterbelakangan dan kemunduran Ummat itu karena faktor eksternal yaitu adanya ketidakadilan dari dunia maju kepada dunia Ketiga yang bersifat imperialisme.

4. Gerakan Islam Fundamentalis di Indonesia

Banyak ahli yang berpendapat bahwa fenomena kemunculan kelompok-kelompok garis keras di dunia Sunni sekarang ini berkaitan dengan reformulasi ideologi *salafi* yang pada awalnya menekankan pada pemurnian akidah, mengalami metamorfosis pada abad ke 20. Salafisme tidak hanya gerakan purifikasi keagamaan semata, tapi menjadi ideologi perlawanan terhadap berbagai paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama.

Reformulasi paham salaf dalam aspek purifikasi agama, pemikiran sosial politik, metode pendidikan dan metode pemikiran. Purifikasi agama adalah paham yang menolak taklid pada pemahaman Islam tradisional, dan bertujuan mengembalikan segala permasalahan yang ada kepada sumber Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Pemikiran sosial politiknya, pada intinya mengajarkan doktrin bahwa kekuasaan milik Allah semata. Metode pendidikan menekankan pada nilai moral agama, seperti takwa, *qanā'ah*, syukur, *zuhd*, sabar dan tawakal. Dan metode pemikiran mengutamakan dimensi akidah-akhlak, yang selanjutnya menggolongkan manusia menjadi 'saudara' dan 'musuh'. Jadi jelas bahwa gerakan salafi yang pada mulanya gerakan pemurnian agama mengalami perumusan ulang dan menjadi sebuah ideologi untuk merespons perkembangan-perkembangan yang terjadi pada abad ke-20,³⁴ seperti kolonialisme, modernisme, sekularisme, liberalisme, dan dominasi barat terhadap ke dunia ketiga. Selain faktor-faktor di atas, gerakan salafi ini juga sebagai respons terhadap buruknya pelayanan negara terhadap masyarakat.

Istilah Islam Fundamental atau "Islam Radikal (meminjam istilah Jamhari dan Jahroni) sebagai sebuah kesatuan dari fenomena sosial dan keagamaan kelompok-kelompok muslim yang sedemikian kompleks, yang kadang tidak sepenuhnya mampu mendeskripsikan fenomena yang beragam atas gerakan-gerakan kurang tepat untuk sebuah penjurukan dan labelisasi yang mapan dan tidak berubah.

Dalam beberapa literatur, istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan ‘fundamentalisme’³⁵ dalam Islam tidak seragam. Istilah Islam Fundamental sering-kali dipakai secara tumpang-tindih dengan istilah ‘Islam Radikal’ atau ‘Islam Revivalis’. Pada dasarnya kelompok-kelompok ini adalah kelompok Islam Pro syariat. Menurut Esposito³⁶ ada beberapa landasan ideologis yang dijumpai dalam gerakan-gerakan tersebut, yaitu:

- 1) Kelompok ini berpendapat bahwa Islam adalah sebuah pandangan hidup yang komprehensif dan bersifat total. Oleh karena itu Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik, hukum, dan masyarakat.
- 2) Ideologi masyarakat Barat yang sekuler dan cenderung materialistis harus ditolak. Mereka juga yakin masyarakat muslim gagal karena telah mengikuti cara pandang Barat yang sekuler dan materialistis.
- 3) Mereka cenderung mengajak pengikutnya ‘kembali kepada Islam’ dengan mengikuti ajaran Islam yang otentik yaitu al-Qur’an dan Sunnah, sebagai sebuah usaha untuk perubahan sosial.
- 4) Peraturan-peraturan sosial yang lahir dari tradisi Barat sebagai warisan kolonialisme harus di tolak. Sebagai gantinya hukum Islam sebagai satu-satunya sumber hukum harus ditegakkan.
- 5) Meskipun kelompok ini terlalu mengagung-agungkan masa kejayaan Islam di masa lalu, tapi mereka tidak menolak modernisasi, seperti tidak menolak sains dan teknologi sejauh tidak bertentangan dengan standar ortodoksi keagamaan yang telah mereka anggap mapan.
- 6) Mereka yakin bahwa upaya-upaya Islamisasi pada masyarakat muslim tidak akan berhasil tanpa adanya penekanan pada aspek pengorganisasian ataupun sebuah kelompok yang kuat.

Sedangkan menurut Jamhari dan Jahroni³⁷ karakteristik ‘Islam Radikal yakni *pertama*, masih memiliki mentalitas ‘Perang Salib’. *Kedua*, penegakan hukum Islam yang sering diupayakan oleh kaum ‘Revivalis’ dan ‘Fundamentalis’ Muslim bukan merupakan alternatif, tetapi sebuah keharusan. *Ketiga*, terdapat kecenderungan untuk melawan pemerintah berikut sistem-sistemnya yang mapan tapi dianggap tidak ‘sah’ karena kurang perhatian terhadap kemaksiatan. *Keempat*, menegakkan agama melalui ‘jihad’ sangat terhormat, bahkan ‘jihad’ melawan kemaksiatan dan kemungkarannya,

sebagai sebuah tugas 'suci'. *Kelima*, persepsi kelompok 'Islam radikal' terhadap kaum Yahudi dan Kristiani, tidak dianggap lagi sebagai kelompok yang di dalam al-Qur'an disebut sebagai Ahli Kitab, melainkan sudah jatuh sebagai kaum 'kafir' karena sejarah kedua agama tersebut identik dengan kolonialisme Barat dan Zionisme yang melakukan konspirasi melawan Islam dan Dunia Islam.

Menurut Zuly Qodir dalam tulisannya *Pemikiran dan Gerakan Islam Indonesia Kontemporer: Kategori dan Karakteristik*,³⁸ pergerakan Islam mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Menolak Pluralisme,
- 2) Berpegang pada *letterlijk* teks,
- 3) Bulat tanpa kompromi,
- 4) Tanpa pelunakan, interpretasi dan pengurangan,
- 5) Oposisionalisme, perlawanan terhadap paham lain yang dianggap bertentangan dengan kitab suci, baik modernisme, pos modernisme, sekularisasi, nilai Barat atau lainnya yang dalam Islam rujukannya adalah al-Qur'an dan Hadis;
- 6) Menolak Hermeneutika. Tidak perlu melakukan interpretasi dan enggan bersikap kritis terhadap teks. Teks harus dipahami *letterlijk*, rasio tidak boleh melakukan kompromi atas ayat-ayat;
- 7) Menolak pluralisme dan relativisme. Pluralisme dianggap sebagai akibat pemahaman teks secara salah dan relativisme muncul akibat intervensi nalar manusia dan perkembangan masyarakat;
- 8) Menolak perkembangan historis dan sosiologis.

Di Indonesia, gerakan Islam garis keras pada masa Indonesia modern adalah gerakan DI/TII (Darul Islam, Tentara Islam Indonesia). DI/TII besar di wilayah Jawa Barat, Aceh dan Makassar. Gerakan mereka berkeinginan untuk menjadikan syariah sebagai dasar negara Indonesia.

Gerakan Islam garis keras muncul kembali pada awal 1970-an dan 1980-an. Kelompok seperti Komando Jihad, Ali Imron, Teror Warman, dan semacamnya yang muncul ke permukaan. Kelompok ini menyatakan perang terhadap komunisme di Indonesia. Gerakan. gerakan ini dijadikan legitimasi bagi pemerintah untuk melarang dan menindak gerakan Islam garis keras di Indonesia.

Pada masa reformasi gerakan Islam garis keras pun bermunculan, seiring dengan roda demokrasi yang digulirkan. Gerakan-gerakan tersebut di

antaranya adalah Gerakan Front Pembela Islam, Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan lain-lain.

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dideklarasikan di Yogyakarta pada bulan Agustus tahun 2000. Terpilih sebagai amirnya adalah Abu Bakar Ba'asyir, salah seorang pendiri pesantren Ngruki Surakarta. MMI mempunyai agenda utama penegakan syariah Islam. Hal ini terkait dengan keinginan mendirikan Negara Islam (Daulah Islamiyah). MMI menganggap dirinya sebagai kelanjutan dari DI/TII.³⁹

Front Pembela Islam (FPI) lahir di Jakarta pada perayaan kemerdekaan RI ke-53, tanggal 17 Agustus 1998, sebagai gerakan penekan yang bertujuan untuk memberantas kemaksiatan seperti pelacuran, rumah hiburan malam dan sebagainya. Pemimpinnya Habib Muhammad Rizieq Syihab, FPI menjadi perhatian publik karena aksi-aksinya sering menggunakan kekerasan. Tujuan perjuangan FPI sebagai organisasi Islam yang berasaskan akidah *ahlus sunnah wal jamaah* adalah untuk *amar ma'ruf nahi munkar*. Kata 'Pembela Islam' menurut Habib Rizieq, maksudnya bukan hanya umat Islam saja yang dibela tapi juga nilai-nilai Islam juga. Motto perjuangan FPJ adalah "Hidup Mulia atau Mati Syahid".⁴⁰

Laskar Jihad menjadi pusat perhatian kira-kira awal tahun 2000, ketika Laskar Jihad menyerukan jihad ke Ambon untuk membantu umat Islam melawan Kristen di Maluku. Laskar jihad yang ingin menumpas kelompok RMS berkonflik dengan kelompok Kristen dan Katolik sebagai tandiangannya yang menamakan Laskar Kristus. Konflik agama pun tidak bisa dihindari. Selain itu laskar Jihad juga ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia, akan tetapi mereka tidak memperjuangkan Negara Islam di Indonesia, lebih memfokuskan dirinya untuk memperbaiki kualitas keislaman individu Muslim. Di samping jihad, Laskar Jihad mengembangkan pesantren untuk anak-anak yatim piatu terutama yang berasal dari Ambon.⁴¹

Catatan Kaki

1. Piort Stomczka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, h. 323.
2. Stomczka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, h. 324.
3. Stomczka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, h. 325.
4. Stomczka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, h. 325.
5. Stomczka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, h. 332-336.
6. Lihat dalam Charles L. Harper, *Exploring Social Change*, (New Jersey: Prentice Hall, 1989), p. 128-129.
7. Harper, *Exploring Social Change*, p. 152.
8. Harper, *Exploring Social Change*, p. 152.
9. Harper, *Exploring Social Change*, p.152-153.
10. Harper, *Exploring Social Change*, p. 153.
11. Harper, *Exploring Social Change*, p. 154.
12. Harper, *Exploring Social Change*, p.155.
13. Budi Munawar Rahman, “Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah, Pemikiran Neo Modernisme Islam di Indonesia”, dalam Asep gunawan, *Artikulasi Islam Kultural*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 476-477.
14. Rusmin Tumanggor, *Sosiologi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press,), h. 55.
15. Murtadha Muthahari, *Falsafah: Pergerakan Islam*, (Bandung: Mizan), h. 44-45.
16. Murtadha Muthahari, *Falsafah Pergerakan Islam*, h. 46.
17. Fachry Ali, “Masa Tak Berwarga Negara: Gerakan-gerakan Protes di Jawa Abad ke19”, dalam Asep Gunawan, *Artikulasi Islam Kultural*, h. 237-238.
18. Fachry Ali, h. 241.
19. Fachry Ali, h. 254-255.
20. Baca lebih jauh dalam Sartono Kartodirjo, *Ratu Adil*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984).
21. Fachry Ali, “Islam dan Pembedayaan Politik Umat: Telaah peran NU dan Muhammadiyah”, dalam Asep Gunawan, *Artikulasi Islam Kultural*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 417.
22. Fachry Ali, *Islam dan Pembedayaan Politik Umat*, h. 417-421.
23. Laode Ida, “Pergulatan Gerakan dan Identitas NU”, dalam Asep Gunawan, *Artikulasi Islam Kultural*, h. 351.
24. Laode Ida, *Pergulatan Gerakan dan Identitas NU*, h. 352-354.
25. Laode Ida, *Pergulatan Gerakan dan Identitas NU*, h. 356-360.
26. *Taqlid* adalah penerimaan keputusan hukum sebuah mazhab secara tidak kritis. *Bid'ah* adalah hal baru dalam ibadah, sedangkan *Khurafat* adalah suatu kepercayaan kepada *tabayul*. yang mendekati syirik.
27. Kuntowijoyo dalam Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2002), h. xix-xx.
28. Lihat Budi Munawar Rahman, “Pemikiran Neo-Modernisme Islam di Indonesia”, dalam Asep Gunawan, *Artikulasi Islam Kultural*, h. 437-490.
29. Budi Munawar Rahman, *Pemikiran Neo-Modernisme Islam di Indonesia*, h. 449-451.
30. Budi Munawar Rahman, *Pemikiran Neo-Modernisme Islam di Indonesia*, h. 450-451.
31. Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987), h. 172.
32. Budi Munawar Rahman, *Pemikiran Neo-Modernisme Islam di Indonesia*, h. 467-473.
33. Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), 286-291.

34. Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. vi -viii.
35. Fundamentalis berpandangan bahwa seluruh kegiatan manusia di dunia ini, termasuk kegiatan politik, harus diatur oleh agama. Bahkan yang disebut agama yang harus mengatur itu bukan hanya agama sebagaimana tertera dalam kitab sucinya, tetapi juga mengikuti secara harfiah apa yang dilakukan oleh pendiri agama itu. Fatthurahman Tulus, “Konflik Mazhab di Pulau Seribu Mesjid”, *Buletin Kebebasan, LSAF*, Jakarta; Edisi No.02/1/ 2007.
36. Baca lebih lanjut dalam Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, h. 4-5.
37. Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, h. 6-8.
38. Baca lebih lanjut dalam Sholahuddin, “Analisis Etno-Religius Pergerakan Islam di Yogyakarta”, dalam *Jurnal Kebebasan, LSAF*, Jakarta; Edisi No.06/VII/2007.
39. Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, h. 6-8.
40. Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, h. 6-8.
41. Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, h. 6-8.

Daftar Pustaka

- Ali, Fachry. “Masa Tak Berwarga Negara: Gerakan-gerakan Protes di Jawa Abad ke19”, dalam Asep Gunawan, *Artikulasi Islam Kultural*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Ali, Fachry. “Islam dan Pembedayaan Politik Umat: Telaah peran NU dan Muhammadiyah”, dalam Asep Gunawan, *Artikulasi Islam Kultural*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Fatthurahman Tulus, “Konflik Mazhab di Pulau Seribu Mesjid”, *Buletin Kebebasan, LSAF*, Jakarta; Edisi No.02/1/ 2007.
- Harper, Charles L. *Exploring Social Cliange*, New Jersey: Prentice Hall, 1989.
- Ida, Laode. “Pergulatan Gerakan dan Identitas NU”, dalam Asep Gunawan, *Artikulasi Islam Kultural*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kartodirjo, Sartono. *Ratu Adil*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.
- Kuntowijoyo dalam Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2002.

- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987.
- Muthahari, Murtadha. *Falsafah: Pergerakan Islam*, Bandung: Mizan.
- Rahman, Budi Munawar. “Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah, Pemikiran Neo Modernisme Islam di Indonesia”, dalam Asep Gunawan, *Artikulasi Islam Kultural*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Rahman, Budi Munawar. “Pemikiran Neo-Modernisme Islam di Indonesia”, dalam Asep Gunawan, *Artikulasi Islam Kultural*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sholahuddin, “Analisis Etno-Religius Pergerakan Islam di Yogyakarta”, dalam *Jurnal Kebebasan, LSAF*, Jakarta; Edisi No.06/VII/2007.
- Tumanggor, Rusmin. *Sosiologi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press.

Joharotul Jamilah, adalah dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Email: jamilah_uin@yahoo.co.id

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004